

Evaluasi Kebijakan Keistimewaan Yogyakarta

Oleh: Dwi Harsono, Suranto, Ariyanti Luger Tri Setyarini

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran tentang kebijakan keistimewaan sudah diimplementasikan selama 10 tahun dan capaiannya di wilayah Yogyakarta

Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif interpretif. Teknik wawancara dan dokumentasi digunakan sebagai metode utama untuk pengumpulan data. Peneliti menggunakan data primer dari wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan data sekunder yang berasal dari data dokumentasi yang terdapat pada lembaga terkait seperti, pemerintah daerah, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, maupun BPS. Di samping itu, data juga diperoleh dari media massa serta sumber kepustakaan lain seperti buku dan jurnal.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta sebagai hasil kebijakan desentralisasi asimetris melalui otonomi khusus telah memberikan kemajuan dalam pengembangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lembaga budaya. Program-program yang disusun sesuai dengan fungsi Pemda sebagai Lembaga budaya yang mengimplementasikan lima urusan keistimewaan. Pemenuhan program keistimewaan juga mengalami pergeseran sesuai dengan fokus penyelenggaraan keistimewaan di Yogyakarta. Pada periode awal, alokasi kegiatan dan dana keistimewaan banyak digunakan untuk urusan pertanahan dan tata ruang karena penataan perlu dilakukan pada sektor tersebut. Lambat laun sesuai dengan perkembangan Pemda DIY sebagai lembaga budaya, urusan kelembagaan dan kebudayaan memperoleh porsi semakin tinggi. Pengembangan institusi budaya diselenggarakan secara komprehensif dari tingkat Pemda hingga desa yang mengalami perubahan nomenklatur menjadi *kundha* hingga *kalurahan*. Namun demikian, dalam penyusunan dan penyelenggaraan keistimewaan masih terpaku pada penerjemahan urusan keistimewaan dalam program-program birokratis sehingga ruang untuk program yang menyentuh aspek kesejahteraan kurang terwadahi. Akibatnya, asumsi bahwa program-program keistimewaan memberikan *leverage effect* pada perbaikan kondisi sosial ekonomi dan kemiskinan dalam masyarakat masih terbatas dan kurang dirasakan.

Kata Kunci: *evaluasi kebijakan, otonomi khusus, keistimewaan, kesejahteraan, Yogyakarta*